

**DAMPAK PENDIDIKAN PADA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI
PROVINSI LAMPUNG (PERIODE 2019-2023)**

(SKRIPSI)

Oleh

PUPUT MELATI

NPM 2111021020



PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

ABSTRACT

IMPACT OF EDUCATION ON THE DECISION MAKING AND ECONOMIC ACTIVITY OF WOMEN IN LAMPUNG PROVINCE (PERIOD 2019-2023)

By

PUPUT MELATI

This study investigates the impact of education on the economic empowerment of women in Lampung Province during the 2019-2023 period. Despite advancements in educational access, significant gender disparities persist in Indonesia, particularly in Lampung, affecting women's participation in the workforce and political decision-making, and contributing to wage gaps. This research aims to analyze how different levels of education influence women's political participation, their involvement in the labor force, and the proportion of their wages relative to men. Employing a quantitative descriptive approach with panel data regression analysis, the study utilizes secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the National Labor Force Survey (SAKERNAS) across 15 regencies/cities in Lampung. Key findings reveal that while higher education (university level) significantly boosts women's labor force participation and wage proportion, secondary education (SMA) plays a more dominant role in fostering political engagement. Furthermore, the study confirms a persistent gender wage gap, with men's participation having a larger impact on wage proportion, and highlights that traditional economic sectors do not significantly influence women's wage proportion. These results underscore the critical role of education in women's empowerment and advocate for targeted policies to enhance educational access, promote equitable wages, and address systemic discrimination to achieve sustainable gender equality in Lampung.

Keywords : *Women's Economic Empowerment; Education; Political Participation; Female Labor Force; Gender Wage Gap; Lampung Province.*

ABSTRAK

DAMPAK PENDIDIKAN TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PROVINSI LAMPUNG (PERIODE 2019-2023)

Oleh

PUPUT MELATI

Penelitian ini menyelidiki dampak pendidikan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di Provinsi Lampung selama periode 2019-2023. Meskipun akses pendidikan telah mengalami kemajuan, kesenjangan gender yang signifikan masih terjadi di Indonesia, khususnya di Lampung, yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan pengambilan keputusan politik, serta berkontribusi terhadap kesenjangan upah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tingkat pendidikan yang berbeda memengaruhi partisipasi politik perempuan, keterlibatan mereka dalam angkatan kerja, dan proporsi upah mereka relatif terhadap laki-laki. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi data panel, penelitian ini memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) di 15 kabupaten/kota di Lampung. Temuan utama mengungkapkan bahwa sementara pendidikan tinggi (tingkat universitas) secara signifikan meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan dan proporsi upah, pendidikan menengah (SMA) memainkan peran yang lebih dominan dalam mendorong keterlibatan politik. Lebih jauh, penelitian ini menegaskan kesenjangan upah gender yang terus berlanjut, dengan partisipasi laki-laki memiliki dampak yang lebih besar pada proporsi upah, dan menyoroti bahwa sektor ekonomi tradisional tidak secara signifikan memengaruhi proporsi upah perempuan. Hasil-hasil ini menggarisbawahi peran penting pendidikan dalam pemberdayaan perempuan dan mengadvokasi kebijakankebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan akses pendidikan, mendorong upah yang adil, dan mengatasi diskriminasi sistemik untuk mencapai kesetaraan gender yang berkelanjutan di Lampung.

Kata Kunci : Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Pendidikan, Partisipasi Politik, Tenaga Kerja Perempuan, Kesenjangan Upah Berdasarkan Gender, Provinsi Lampung.

**DAMPAK PENDIDIKAN TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DI PROVINSI LAMPUNG (PERIODE 2019-2023)**

**Oleh
PUPUT MELATI**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

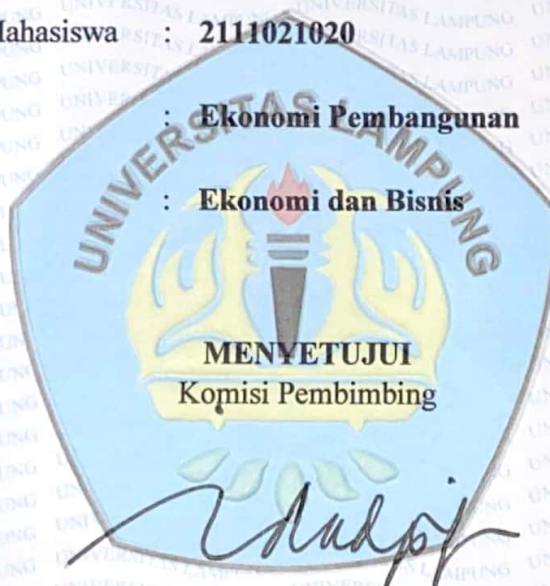
Judul Skripsi : **DAMPAK PENDIDIKAN PADA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI
PROVINSI LAMPUNG (PERIODE 2019-
2023)**

Nama Mahasiswa : **Puput Melati**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2111021020**

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Dr. Ida Budiarty, S.E., M.Si.
NIP. 196303251987072001

MENGETAHUI
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Arvina Ratih Y.T., is written over the 'MENGETAHUI' section.

Dr. Arvina Ratih Y.T, S.E., M.M.
NIP. 198007052006042002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

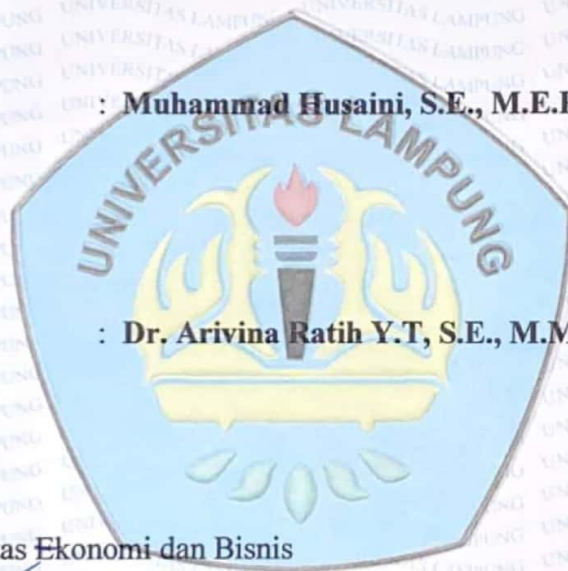
: **Dr. Ida Budiarty ., S.E., M.Si.**

Penguji I

: **Muhammad Husaini, S.E., M.E.P**

Penguji II

: **Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Juli 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puput Melati

NPM : 2111021020

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Dampak Pendidikan Pada Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Lampung (Periode 2019-2023)” telah ditulis dengan sungguh- sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Puput Melati

NPM. 2111021020

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Puput Melati yang dilahirkan di Desa Raman Fajar, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 26 Mei 2003, merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Bakin dan Ibu Kismiasih.

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2008 di Taman Kanak-Kanak (TK) PKK Raman Fajar yang diselesaikan pada tahun 2009. Sekolah Dasar di SDN 2 Raman Fajar yang diselesaikan pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di MTSN 2 Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2018. Dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kotagajah yang di selesaikan pada tahun 2021.

Pada tahun yang sama 2021, penulis diterima di Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan, dengan pengumuman hasil diterima pada tanggal 22 Maret 2021. Selama perkuliahan penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, termasuk HIMEPA (Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan) di mana saya menjabat sebagai Staf pada tahun 2022. Selain itu, penulis juga mengikuti organisasi EBEC (Economi dan Business Entrepener Club) dimana saya menjabat sebagai Staf Biro Humas pada tahun 2023. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang selama menjalani pendidikan di Universitas Lampung.

MOTTO

"Dan Dia (Allah) yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap usaha."

(QS. Al-Mulk: 2)

"Allah tidak menjajikan hidupmu selalu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa : fa inna ma'al- 'usri yusra, inna ma'al-yusri yusra"

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

"Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu"

(Umar bin Khattab)

"Orang lain tidak akan faham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories* nya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini"

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan penghormatan, saya persembahkan skripsi ini kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan inspirasi dalam setiap langkah hidup saya. Tanpa bimbingan dan kasih sayang-Nya, saya tidak akan mampu melewati berbagai tantangan yang saya hadapi selama proses pendidikan ini. Saya juga ingin mempersembahkan karya ini kepada orang tua saya, Ayah Bakin dan Ibu Kismiasih serta kakak saya Ernawati yang telah menjadi pilar utama dalam hidup saya. Dukungan, pengorbanan, dan cinta yang tiada henti dari mereka telah memberikan motivasi yang luar biasa bagi saya untuk terus berjuang dan mencapai impian saya.

Kepada dosen pembimbing saya, Dr. Ida Budiarty, S.E., M.Si, saya sampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan kritik yang konstruktif telah membantu saya untuk memperbaiki dan menyempurnakan karya ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf di Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan saya.

Tidak lupa, saya persembahkan karya ini kepada teman-teman saya yang selalu mendukung dan menemani saya dalam suka dan duka selama menjalani masa perkuliahan. Kebersamaan, tawa, dan kenangan indah yang kita ciptakan akan selalu saya ingat dan hargai. Semoga karya ini dapat menjadi sumbangsih yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Dampak Pendidikan Pada Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Lampung (Periode 2019-2023)”* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pembangunan pada Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Arivina Ratih Y.T, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
4. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Ida Budiarty, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing;
6. Bapak Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak Muhammad Husaini, S.E., M.E.P. selaku dosen penguji dengan saran yang diberikan untuk menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan skripsi;
8. Cinta Pertama dan panutanku, Ayahanda Bakin terima kasih penulis ucapkan telah menjadi teladan yang baik, mengajarkan arti kerja keras, kejujuran, dan

cinta. Meskipun ayah lulusan Sekolah Dasar tapi Allah mampukan ayah untuk membawa karir anak-anaknya yang beribu ribu langkah lebih maju dari ayah, ayah selalu senantiasa memberikan yang terbaik, memberikan dukungan yang baik secara moral dan finansial. Serta mempriorotaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga penulis bisa membuatmu bangga dan meneruskan warisan kebaikan yang telah kau tanamkan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud kecil dari terima kasih penulis yang tak terhingga;

9. Ibuku tercinta, Kismiasih engkau adalah bintang yang selalu bersinar dalam hidupku setiap hari, meskipun ibu hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama tapi mampu menjadikan anak-anaknya menjadi sarjana dan pascasarjana, engkau selalu senantiasa memberikan doa terbaik, penulis bersyukur atas kasih sayang dan pengorbananmu yang tiada henti dalam pelukanmu. Terima kasih penulis ucapkan telah menjadi sosok yang kuat dan penuh cinta. Semoga penulis bisa membalas semua kebaikanmu dan membuatmu bangga. Penulis sudah mampu memenuhi keinginanmu yang penuh harap untuk salah satu anaknya bisa kuliah di bangku Universitas Lampung;

10. Kakak tersayang kandungku, Ernawati, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Di setiap jatuhku, ada tanganmu yang menguatkan. Terima kasih, untuk semua yang tak pernah kau minta balasannya. Atas semua dukungan, kesabaran, dan doa yang tak pernah putus penulis bersyukur memilikimu;

11. Galang Edo Romansyah, seseorang yang sejak awal perjalanan kuliahku sudah setia dari semester satu, hingga akhirnya aku bisa menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kesabaran yang tak pernah surut, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Semoga kita bisa terus melangkah bersama, menggapai impian-impian berikutnya.

12. Desi Apriani, terima kasih telah menjadi kakak yang baik yang selalu ada meski tak selalu terlihat. Menyisakan tempat dalam hidupmu seolah aku bagian dari darah yang sama. kasih sayang dan perhatianmu begitu tulus melebihi yang tidak bisa penulis balas dengan kata.

13. Ayu Lestari, untuk saudaraku se-cicit, yang meski tak tumbuh serumah, namun hatimu selalu dekat. Terima kasih penulis ucapkan atas rasa kekeluargaan, canda tawa, dan doa yang tak pernah putus. Persaudaraan ini adalah anugerah yang ternilai;

14. Ibu Esti Purwanti dan Bapak Sarijo sepupuku, yang dengan tulus membuka pintu rumah dan hatinya selama penulis menjalani masa-masa penuh perjuangan ini. Terima kasih atas keramahan, ketenangan, dan rasa “rumah” yang tak pernah kau ragu berikan. Kebaikanmu menjadi bagian penting dari skripsi ini;

15. Micel Okta Via, Kalila Aulia Rifda dan Br. Marpaung Dhya Lavanya Ghiffy, Untuk tiga adik keponakan, kalian mungkin tak tahu bahwa setiap kepulangan penulis ke rumah kalian adalah jeda paling indah di tengah hari-hari panjang penulis. Terima kasih penulis ucapkan telah menjadi pelipur lelah di saat yang paling aku butuhkan;

16. Kepada Dea Pitri Dayanti, dari banyaknya kesempatan yang pernah semesta berikan, senang karena bisa menemukanmu di kampus yang seluas ini. Perjalanan ini mempertemukan sejak awal langkah di dunia perkuliahan. Dari NPM yang atas bawah, selama di perkuliahan satu kelas terus, dan di perjalanan skripsi ini juga bisa bareng karena dosen pembimbingnya sama. Terima kasih penulis ucapkan telah berjalan bersama, dalam tawa, tangis, hingga akhirnya kita sampai di titik ini. Persahabatanmu adalah bagian berharga dari cerita ini;

17. Kepada Fahmi Destry Amelia dan Aisah Atnia Zulaikha yang tak pernah lelah saat penulis membutuhkan pertolongan. Terima kasih penulis ucapkan atas ketulusanmu yang tak pernah berubah. Kebaikanmu selama perkuliahan ini menjadi penopang penting dalam setiap langkah penulis. Penulis tak akan pernah lupa caramu hadir di saat penulis paling butuh bantuan;

18. Kepada Wina Clara Putri Dewita dan Septiana Tri Susanti yang dulu segala hal kita lalui bersama ngekos bareng, makan bareng, berjuang bareng, bahkan diam pun kita rasakan bersama. Masa kuliah kita terlalu banyak ceritanya kalau ditulis satu-satu. Terima kasih penulis ucapkan telah menjadi bagian penting

dalam cerita perjalananku. Kebersamaan kita adalah kenangan yang akan terus aku bawa, selamanya;

19. Cholly Fatun Nisa yang dengan sabar membimbing penulis memahami cara mengolah data dalam skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan atas ilmu, waktu, dan kesabaranmu. Bantuanmu menjadi bagian penting dari tercapainya karya ini;

20. Kepada seluruh teman satu bimbingan “bu ida family” yang tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan saling bantu selama proses ini;

21. Kepada teman-teman seangkatan Ekonomi Pembangunan 2021 tak lupa, rasa terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada seluruh teman-teman satu angkatan yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kebersamaan kita bukan hanya soal duduk di bangku kuliah yang sama, tapi juga soal saling menyemangati, saling mendukung, dan berbagi suka duka dalam proses meraih gelar sarjana;

22. Kepada Alma Rahma Wati, terima kasih atas segala waktu dan tenaga yang sudah diberikan kepada penulis semoga Allah SWT. Senantiasa memperlancar segala urusan kamu;

23. Kepada Penulis, Puput Melati terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah, meski lelah sering datang, meski air mata sempat jatuh, dan meski semangat pernah redup. Di tengah rasa ragu dan tekanan yang tak jarang menghantam, kamu tetap memilih untuk bangkit dan terus melangkah.

Bandar Lampung, 21 Juli 2025

Penulis

Puput Melati

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Pemberdayaan Human Capital.....	10
2.2 Teori Masa Kritis	11
2.3 Teori Gender dan Pembangunan.....	12
2.3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	12
2.3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	15
2.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	16
2.3.4 Program Pembangunan Responsif Gender (PPRG).....	21
2.3.5 Alokasi Anggaran Biaya Kesehatan Reproduksi	22
2.3.6 Penitipan Anak.....	24
2.4 Hubungan antar variabel.....	25
2.5 Penelitian Terdahulu	27
2.6 Kerangka Berfikir.....	29
2.7 Hipotesis	31
2.7.1 Hipotesis Model Partisipasi Politik Perempuan	31
2.7.2 Hipotesis Model Tingkat Partisipasi Perempuan di Angkatan Kerja	31
2.7.3 Hipotesis Model Proporsi Upah.....	32
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	32
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	33

3.2.1 Variabel Dependen	33
3.2.2 Variabel Independen	33
3.3 Tempat dan Waktu	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Metode Analisis Data	35
3.6 Teknik Estimasi Regresi Panel	38
3.7 Pengujian Model Panel.....	39
3.8 Uji Asumsi Klasik.....	41
3.8.1 Uji Normalitas.....	41
3.8.2 Uji Multikolinearitas.....	42
3.8.3 Uji Heterokedastisitas	43
3.9 Uji Statistik.....	43
3.9.1 Uji-t.....	43
3.9.2 Uji F	44
3.10 Uji Koefisien Determinasi R^2	44
3.10.1 Uji R^2	44
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Analisis Statistik Deskriptif Y1	46
4.2 Pengujian Spesifikasi Model	48
4.2.1 Uji Chow.....	48
4.2.2 Uji Hausman	48
4.2.3 Uji Lagrange Multiplier	49
4.3 Model Regresi Data Panel	50
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	52
4.4.1 Uji Normalitas.....	52
4.4.2 Uji Multikolonieritas.....	52
4.4.3 Uji Autokorelasi.....	53
4.4.4 Uji Heteroskedastisitas	54
4.5 Uji Hipotesis.....	55
4.5.1 Uji t (uji parsial).....	55
4.5.2 Uji F (uji simultan)	56
4.5.3 Koefisien Determinasi <i>Adjusted R-squared</i> (R^2)	57
4.6 Pembahasan Partisipasi Politik Perempuan.....	57
4.6.1 Pengaruh EDUC1 dan EDUC2 terhadap Partisipasi Politik Perempuan	57
4.7 Analisis Statistik Deskriptif Perempuan di Angkatan Kerja.....	60

4.8 Pengujian Spesifikasi Model	61
4.8.1 Uji Chow	62
4.8.2 Uji Hausman	62
4.8.3 Uji Lagrange Multiplier	63
4.9 Model Regresi Data Panel	64
4.10 Uji Asumsi Klasik	66
4.10.1 Uji Normalitas	66
4.10.2 Uji Multikolonieritas	67
4.10.3 Uji Autokorelasi	67
4.10.4 Uji Heteroskedastisitas	68
4.11 Uji Hipotesis	69
4.11.1 Uji t (uji parsial)	69
4.11.2 Uji F (uji simultan)	70
4.11.3 Koefisien Determinasi <i>Adjusted</i> (R^2)	71
4.12 Pembahasan Perempuan di Angkatan Kerja	72
4.13 Analisis Statistik Deskriptif Proporsi Upah	76
4.14 Pengujian Spesifikasi Model	78
4.14.1 Uji Chow	78
4.14.2 Uji Hausman	79
4.14.3 Uji Lagrange Multiplier	80
4.15 Model Regresi Data Panel	80
4.16 Uji Asumsi Klasik	83
4.16.1 Uji Normalitas	84
4.16.2 Uji Multikolonieritas	84
4.16.3 Uji Autokorelasi	85
4.16.4 Uji Heteroskedastisitas	86
4.17 Uji Hipotesis	87
4.17.1 Uji t (uji parsial)	87
4.17.2 Uji F (uji simultan)	89
4.17.3 Uji Koefisien Determinasi <i>Adjusted</i> (R^2)	90
4.18 Pembahasan Proporsi Upah	90
4.18.1 Pengaruh EDUC1 dan EDUC2 terhadap Proporsi Upah	90
4.18.2 Pengaruh Jenis Sektor Terhadap Proporsi Upah	91
4.18.3 Pengaruh Laki-laki dan Perempuan Yang Bekerja Terhadap Proporsi Upah	92

V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
5.1 Kesimpulan Partisipasi Politik Perempuan	95
5.2 Kesimpulan Perempuan di Angkatan Kerja	95
5.3 Kesimpulan Proporsi Upah.....	96
5.4 Saran Partisipasi Politik Perempuan.....	96
5.5 Saran Perempuan di Angkatan Kerja.....	97
5.6 Saran Proporsi Upah.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	27
Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	46
Tabel 3. Hasil Uji Chow	48
Tabel 4. Hasil Uji Hausman	49
Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier	50
Tabel 6. Hasil Nilai Korelasi Antar Variabel Independen	53
Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi	54
Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 9. Uji t	55
Tabel 10. Uji F	56
Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi <i>Adjusted</i> (R^2)	57
Tabel 12. Hasil Analisis Deskriptif	60
Tabel 13. Hasil Uji Chow	62
Tabel 14. Hasil Uji Hausman	63
Tabel 15. Hasil Regresi Lagrange Multiplier	63
Tabel 16. Hasil Nilai Korelasi Antar Variabel Independen	67
Tabel 17. Hasil Uji Autokorelasi	68
Tabel 18. Hasil Uji Heteroskedastisitas	68
Tabel 19. Uji t	69
Tabel 20. Uji F	71
Tabel 21. Koefisien Determinasi <i>Adjusted</i> (R^2)	71
Tabel 22. UMP dan Pengeluaran Konsumsi Desa dan Kota	75
Tabel 23. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	76
Tabel 24. Hasil Uji Chow	79
Tabel 25. Hasil Uji Hausman	79
Tabel 26. Hasil Uji Lagrange Multiplier	80
Tabel 27. Hasil Nilai Korelasi Antar Variabel Independen	85
Tabel 28. Hasil Uji Autokorelasi	86
Tabel 29. Hasil Uji Heteroskedastisitas	86
Tabel 30. Uji t	87
Tabel 31. Uji F	89
Tabel 32. Uji Koefisien Determinasi <i>Adjusted</i> (R^2)	90
Tabel 33. Besaran Rata-rata Upah Laki-laki dan Perempuan	93

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Tingkat Pendidikan Perempuan.....	5
Gambar 2. TPAK laki-laki dan Perempuan.....	6
Gambar 3. Kesenjangan Upah antara laki-laki dan perempuan.....	6
Gambar 4. Kerangka Berfikir.....	31
Gambar 5. Hasil Uji Normalitas - Jarque-Bera.....	52
Gambar 6. Hasil Uji Normalitas - Jarque-Bera.....	66
Gambar 7. Hasil Uji Normalitas - Jarque-Bera.....	84

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan gender adalah isu global yang semakin mendesak, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi, di mana kesetaraan gender menjadi prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Perempuan yang terdidik memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, memulai usaha, dan berkontribusi pada perekonomian keluarga dan komunitas. Tingkat pendidikan yang memadai, membawa perempuan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dan berpartisipasi dalam berbagai sektor ekonomi, sehingga meningkatkan pendapatan dan kemandirian mereka. Sejalan dengan konsep Sustainable Development Goals (SDGs). Terutama SDG 4 menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas, sementara SDG 5 berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pencapaian tujuan-tujuan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup perempuan, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan global. Dengan meningkatkan pendidikan perempuan, maka perempuan dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan SDGs dan menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan (Sudirman & Susilawaty, 2022).

Di Indonesia, meskipun telah terjadi kemajuan dalam akses pendidikan, masih terdapat kesenjangan gender yang signifikan. Perempuan sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, termasuk faktor budaya, ekonomi, dan sosial. Misalnya, di beberapa daerah, norma-norma budaya masih menganggap bahwa pendidikan untuk anak laki-laki lebih penting dibandingkan dengan anak perempuan. Keterbatasan akses ini berdampak pada kemampuan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penghalang, di mana keluarga

mungkin lebih memilih untuk menginvestasikan sumber daya mereka pada pendidikan anak laki-laki. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan politik. Dengan memahami hambatan-hambatan ini, kita dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan. (Sudirman & Susilawaty, 2022).

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam konteks global, pendidikan diakui sebagai kunci untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan yang baik dapat menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan inovatif, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perhatian terhadap pendidikan, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan, seperti perempuan, menjadi sangat penting. Pendidikan perempuan tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan, karena perempuan yang terdidik cenderung lebih mampu memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka dan berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan keluarga (Bayumi, Rahaman et al., 2022).

Partisipasi politik perempuan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Perempuan yang terdidik cenderung lebih aktif dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Pendidikan memberikan perempuan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan pentingnya keterlibatan dalam proses politik. Dengan meningkatnya partisipasi politik, perempuan dapat memperjuangkan kepentingan mereka dan berkontribusi pada kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan keterampilan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat suara perempuan dalam masyarakat (Sudirman & Susilawaty, 2022).

Meskipun peraturan nasional mewajibkan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, saat ini hanya sekitar 20% kursi di DPRD Lampung yang diisi oleh perempuan. Di sektor ketenagakerjaan, meskipun teori modal manusia menyatakan bahwa pendidikan tinggi meningkatkan akses terhadap pekerjaan formal yang bergaji layak, banyak perempuan berpendidikan di Lampung yang masih bekerja di sektor informal seperti pertanian, perdagangan skala kecil, dan pekerjaan domestik, terutama di wilayah pedesaan (Darmastuti, 2022).

Dengan demikian, pendidikan di Provinsi Lampung secara signifikan berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik perempuan. Ini mengindikasikan bahwa pendidikan, pada berbagai jenjangnya, adalah instrumen penting dalam memberdayakan perempuan untuk terlibat aktif dalam proses politik di Provinsi Lampung.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Lampung masih jauh di bawah laki-laki, mencerminkan adanya hambatan struktural yang harus diatasi. Pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan TPAK perempuan dengan memberikan mereka keterampilan yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja. Selain itu, perempuan yang terdidik lebih mungkin untuk memulai usaha sendiri, yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, pendidikan berperan penting dalam menciptakan peluang kerja yang lebih baik bagi perempuan. Hal ini juga dapat membantu mengurangi ketergantungan ekonomi perempuan pada laki-laki (Rogayah, 2021).

Isu penting lain yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan perempuan adalah proporsi upah laki-laki terhadap perempuan. Meskipun perempuan sering kali memiliki pendidikan dan keterampilan yang setara, mereka masih menerima upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi gender dalam dunia kerja yang perlu diatasi melalui kebijakan yang mendukung kesetaraan upah. Pendidikan yang baik dapat membantu perempuan untuk menuntut hak-hak mereka dan memperjuangkan kesetaraan dalam upah. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan pendidikan perempuan juga harus

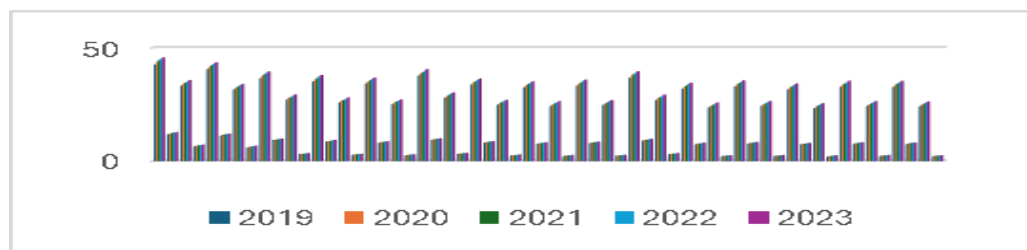
disertai dengan langkah-langkah untuk mengatasi ketidakadilan dalam sistem upah (Lusiyanti, 2020).

Provinsi Lampung, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang unik. Dengan populasi yang beragam dan berbagai tantangan yang dihadapi, pendidikan perempuan di Lampung menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan berbagai lembaga telah berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan, termasuk program Beasiswa Pendidikan untuk Anak (BPPA) dan program Pendidikan Keluarga Harapan (PKH). Di Provinsi Lampung, pemerintah daerah juga telah berupaya untuk mengurangi kesenjangan gender dalam pendidikan melalui program-program yang mendukung pendidikan perempuan, seperti pelatihan keterampilan dan penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih baik. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan (Jeevanasai et al., 2023).

Lampung memiliki jumlah perempuan di parlemen yang lebih sedikit dibandingkan dengan dua provinsi terdekat, yaitu Sumatra Selatan dan DKI Jakarta. Stagnasi dalam jumlah perempuan di parlemen Lampung menunjukkan adanya tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. DKI Jakarta memiliki lebih banyak perempuan di parlemen dibandingkan dengan Sumatra Selatan, dan Sumatra Selatan juga lebih unggul daripada Lampung dalam hal ini. Ini menunjukkan bahwa Lampung masih tertinggal dibandingkan dengan kedua provinsi tersebut. Ada berbagai hambatan yang perlu diatasi agar lebih banyak perempuan dapat terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Sementara Lampung mengalami stagnasi, DKI Jakarta menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam representasi perempuan. Kesenjangan antara Lampung dan DKI Jakarta mencerminkan perbedaan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik.

Selama periode ini, berbagai inisiatif dan program telah diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik.

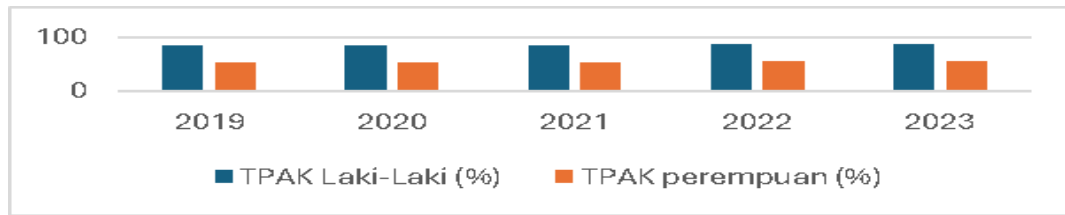
Namun, hasil yang dicapai masih belum memadai. Keterwakilan perempuan yang rendah di parlemen tidak hanya berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang inklusif, tetapi juga memperkuat stereotip gender yang menganggap bahwa perempuan tidak cocok untuk posisi kepemimpinan. Secara keseluruhan, meskipun ada sedikit kemajuan dalam representasi perempuan di DPRD Lampung dari tahun 2019 hingga 2023, tantangan yang ada masih memerlukan perhatian serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik harus terus didorong agar suara dan kepentingan perempuan dapat terwakili dengan lebih baik dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah 2024)

Gambar 1. Tingkat Pendidikan Perempuan

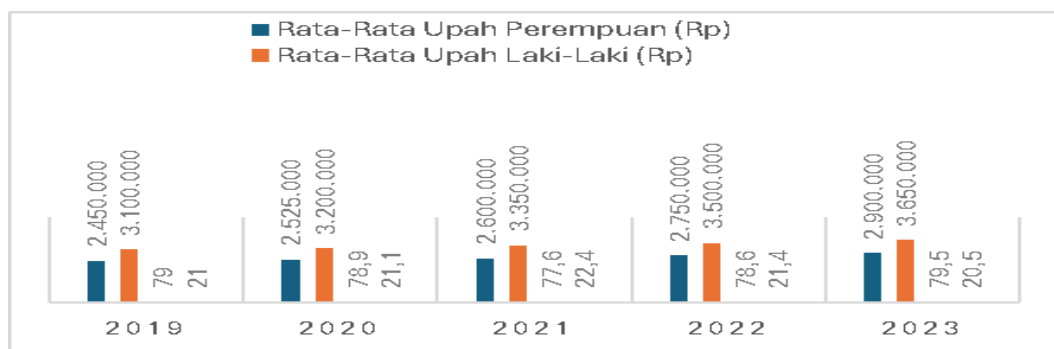
Dari grafik diatas menunjukkan data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perempuan di Lampung masih bervariasi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Misalnya, pada tahun 2023, tingkat partisipasi pendidikan perempuan di Bandar Lampung mencapai 45,6% untuk tingkat SMA, sementara di daerah pedesaan seperti Pesisir Barat dan Way Kanan, angka tersebut hanya sekitar 30%. Selain itu, tingkat kelulusan perempuan di Lampung pada tahun 2023 hanya mencapai 70%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 80%. Perbedaan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah yang lebih terpencil.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah 2024)

Gambar 2. TPAK laki-laki dan Perempuan

Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Lampung dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat gambaran yang menarik tentang dinamika ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki menunjukkan kestabilan yang sangat tinggi, berkisar antara 85-87% sepanjang periode lima tahun. Pada tahun 2019, TPAK laki-laki tercatat sebesar 86,14% dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2023 dengan 86,95%, yang mengindikasikan bahwa hampir sembilan dari sepuluh laki-laki di Lampung terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, partisipasi angkatan kerja perempuan menampilkan kondisi yang berbeda. Dimulai dari 52,96% pada tahun 2019, perempuan Lampung menunjukkan peningkatan bertahap hingga mencapai 55,47% pada tahun 2023. Meskipun terdapat kenaikan sebesar 2,51%, angka ini masih jauh di bawah tingkat partisipasi laki-laki, yang mengungkapkan adanya kesenjangan struktural dalam akses dan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah 2024)

Gambar 3. Kesenjangan Upah antara laki-laki dan perempuan

Berdasarkan data kesenjangan upah di Provinsi Lampung periode 2019-2023, terdapat pola yang menarik dalam kondisi pengupahan antara perempuan dan laki-

laki. Sepanjang periode tersebut, rata-rata upah perempuan konsisten lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2019, perempuan memperoleh upah rata-rata Rp2.450.000 sementara laki-laki mencapai Rp3.100.000, dengan rasio upah sekitar 79% dan kesenjangan 21%. Tren kesenjangan upah mengalami fluktuasi minimal selama lima tahun terakhir. Puncak kesenjangan terjadi pada tahun 2021 dengan rasio upah terendah 77,6% dan kesenjangan mencapai 22,4%. Menariknya, pada tahun 2023 kesenjangan mulai menurun, dengan rasio upah meningkat menjadi 79,5% dan kesenjangan turun menjadi 20,5%. Meskipun terjadi peningkatan bertahap upah perempuan dari Rp2.450.000 pada 2019 menjadi Rp2.900.000 pada 2023, gap penghasilan dengan laki-laki masih cukup signifikan. Data ini mengindikasikan masih diperlukannya upaya-upaya konkret untuk mengurangi disparitas pengupahan berbasis gender di Provinsi Lampung.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung dengan pertimbangan efisiensi biaya dan waktu yang dimiliki, serta kemudahan dalam mengakses data sekunder yang dibutuhkan. Selain itu, Lampung dipilih sebagai fokus penelitian untuk memastikan kelayakan dan efektivitas dalam pengumpulan dan analisis data.

Menurut hasil penelitian (Sari & Sulastri, 2024) pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua tahap perencanaan pembangunan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi perempuan. Sedangkan menurut penelitian (Hidayat, 2018) pentingnya melibatkan perempuan secara lebih inklusif dalam pembangunan dan mengatasi hambatan yang mereka hadapi agar upaya pemberdayaan dapat berhasil. Menunjukkan bahwa kurangnya akses pendidikan bagi perempuan di Lampung berhubungan erat dengan faktor ekonomi, yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi lebih dalam.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi hubungan antara tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan dalam memanfaatkan pendidikan untuk pemberdayaan ekonomi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih

dalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan dalam memanfaatkan pendidikan untuk pemberdayaan ekonomi (Hausmann et al., 2022).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, saya ingin melakukan tolak ukur **“Dampak Pendidikan Pada Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Lampung (Periode 2019-2023)”** dengan menarik rumusan masalah untuk melakukan studi komparatif antar daerah, guna mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diadopsi. Selain itu, pengukuran dampak yang lebih komprehensif juga diperlukan untuk memastikan bahwa upaya pemberdayaan ekonomi perempuan memberikan hasil yang signifikan dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa Besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik perempuan di Provinsi Lampung?
2. Apakah tingkat pendidikan dan upah mempengaruhi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Provinsi Lampung?
3. Apakah tingkat pendidikan dan laki-laki & perempuan yang bekerja berpengaruh signifikan terhadap proporsi upah di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik perempuan di Provinsi Lampung tahun 2019-2023
2. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan upah terhadap partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Provinsi Lampung tahun 2019-2023
3. Mengetahui apakah pengaruh tingkat pendidikan dan laki-laki & perempuan yang bekerja terhadap proporsi upah di Provinsi Lampung tahun 2019-2023

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang perencanaan pembangunan berbasis gender, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan. Penulis dapat

mengembangkan kemampuan analisis kritis terhadap kebijakan pembangunan daerah dan dampaknya terhadap kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga membantu penulis dalam mengasah keterampilan riset, mulai dari pengumpulan data hingga analisis hasil, yang dapat berguna dalam penelitian atau karier di masa mendatang.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini menjadi sumber informasi yang berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan gender. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi gender dan pembangunan. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang perencanaan pembangunan berbasis gender. Penelitian ini juga dapat mendorong diskusi dan penelitian lanjutan di bidang yang sama, serta memperkaya literatur yang ada mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam konteks pembangunan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pemberdayaan Human Capital

Menurut Becker (2014) Teori Human Capital menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan daya beli untuk meningkatkan produktivitas individu dan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, yang berhubungan dengan pendapatan yang lebih tinggi, sementara kesehatan yang baik meningkatkan kapasitas kerja dan mengurangi absensi. Daya beli yang lebih tinggi memungkinkan akses yang lebih baik ke pendidikan dan layanan kesehatan, menciptakan hubungan timbal balik antara ketiga aspek tersebut. Secara keseluruhan, investasi dalam human capital tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Pemberdayaan human capital merujuk pada proses meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan individu atau kelompok untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka. Ini melibatkan investasi dalam pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam ekonomi dan masyarakat. Pemberdayaan human capital bertujuan untuk menciptakan individu yang lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sosial. Dengan memberdayakan human capital, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan (UNDP, 2020).

Teori Human Capital (Modal Manusia) menjadi salah satu landasan utama dalam analisis ekonomi pendidikan dan tenaga kerja. Teori ini menyatakan bahwa individu atau masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya

melalui investasi pada aspek-aspek non-fisik seperti pendidikan, pelatihan, dan kesehatan (Becker, 1993).

Dalam konteks pendidikan, teori ini memandang pendidikan sebagai bentuk investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan kognitif seseorang. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan individu memperoleh pekerjaan yang lebih produktif, dengan penghasilan yang lebih besar. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula nilai produktivitasnya di pasar tenaga kerja (Becker, 2014). Di sektor tenaga kerja, teori Human Capital menjelaskan bahwa perbedaan dalam tingkat produktivitas antarindividu disebabkan oleh perbedaan dalam akumulasi modal manusia. Tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan lebih tinggi cenderung memiliki peluang kerja yang lebih baik, bekerja di sektor formal, dan menempati posisi profesional atau manajerial. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan tenaga kerja menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang lebih inklusif.

Teori ini juga berkaitan erat dengan isu kesenjangan upah (*gender wage gap*). Perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan sering dijelaskan melalui perbedaan akumulasi modal manusia, seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan. Namun demikian, meskipun teori ini menekankan bahwa upah seharusnya mencerminkan produktivitas, kenyataannya perempuan dengan tingkat pendidikan yang sama masih menerima upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor human capital, ada pula faktor struktural dan diskriminatif yang memengaruhi kesenjangan upah berdasarkan gender (Becker, 1993 ; (Blau, 2023).

2.2 Teori Masa Kritis

Teori *Critical Mass* dalam kajiannya mengenai perempuan sebagai minoritas di lingkungan korporasi. Konsep ini kemudian diadaptasi dalam studi politik dikembangkan lebih lanjut oleh (Childs & Krook, 2008) dalam konteks representasi politik perempuan. Teori ini menyatakan bahwa kehadiran perempuan dalam jumlah kecil dalam suatu institusi, seperti parlemen, cenderung menjadikan mereka sebagai "token" atau simbol belaka, yang tidak memiliki kekuatan kolektif

untuk memengaruhi kebijakan atau budaya institusional secara signifikan. Individu yang berada dalam kelompok minoritas mengalami tekanan simbolik, pengucilan, dan pelabelan stereotipik, yang membatasi kemampuan mereka untuk bertindak independen atau memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Dalam kondisi ini, mereka tidak hanya kesulitan membentuk aliansi, tetapi juga cenderung menyesuaikan diri dengan norma mayoritas. Namun, ketika proporsi kelompok minoritas dalam hal ini perempuan mencapai ambang tertentu atau "massa kritis", umumnya diidentifikasi pada kisaran 30%, dinamika kelompok mulai berubah. Perempuan mulai mampu membentuk koalisi, menampilkan keberagaman pandangan, serta memengaruhi proses pengambilan keputusan dan arah kebijakan.

Menurut Childs & Krook (2008) mengkritisi pemahaman sempit terhadap teori ini yang terlalu menekankan pada kuantitas semata. Mereka menyarankan agar fokus juga diberikan pada kualitas partisipasi, identitas politik, dan konteks institusional yang memengaruhi perilaku perempuan di ranah politik. Dengan demikian, teori *Critical Mass* tidak hanya bicara soal angka, tetapi juga soal kondisi sosial-politik yang memungkinkan perempuan benar-benar dapat berkontribusi secara substantif dalam lembaga pengambilan keputusan.

2.3 Teori Gender dan Pembangunan

Pendekatan pembangunan berbasis gender merupakan strategi pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan posisi sosial laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. March et al. (1999) menekankan pentingnya integrasi analisis gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menciptakan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan sosial-ekonomi.

2.3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Menurut (UNDP, 2020) SDGs mengintegrasikan perspektif gender sebagai salah satu prinsip fundamental dalam kerangka pembangunan berkelanjutan global.

SDGs ada 17 tujuan serangkain yang di rancangkan oleh PBB (Perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 2015. Salah satunya kesetaraan gender, yang menjadi fokus utama dalam Goal 5, juga berhubungan erat dengan tujuan lainnya, seperti Goal 1 (mengakhiri kemiskinan) dan Goal 4 (pendidikan yang inklusif). Penting untuk menekankan bahwa pencapaian SDGs tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk perempuan. Tujuannya dengan memberdayakan perempuan dan menghapus diskriminasi struktural, kita dapat mendorong transformasi sosial yang signifikan yang akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas kehidupan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program pembangunan tidak hanya mempertimbangkan, tetapi juga secara aktif mempromosikan kesetaraan gender, sehingga dapat mencapai tujuan SDGs secara efektif dan berkelanjutan (Jeevanasai et al., 2023).

Perencanaan pembangunan berbasis gender merupakan suatu pendekatan yang dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan proyek pembangunan memperhitungkan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gender serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. Bahwa hasil pembangunannya mulai dari perencanaan sampai pembangunan meliputi :

1. Keterwakilan Perempuan di Politik

Perencanaan pembangunan berbasis gender mendorong keterlibatan perempuan dalam proses politik dengan memastikan adanya akses yang setara terhadap posisi pengambilan keputusan. Melalui kebijakan afirmatif seperti kuota 30%, perempuan diberi ruang untuk menduduki posisi strategis dalam lembaga legislatif dan pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan representasi gender dalam struktur kekuasaan politik, serta menciptakan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.

2. Partisipasi Perempuan dalam Angkatan Kerja

Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencerminkan adanya hambatan struktural yang mengakar, seperti pembagian peran gender tradisional, beban ganda, serta keterbatasan akses terhadap pelatihan dan peluang kerja layak. Dalam kerangka pembangunan berbasis gender, strategi yang diambil meliputi penyediaan layanan pendukung seperti penitipan anak, pelatihan keterampilan berbasis gender, dan kebijakan ketenagakerjaan yang adil. Tujuannya adalah meningkatkan keterlibatan produktif perempuan dalam sektor ekonomi formal dan informal.

3. Perbedaan Upah laki-laki terhadap Perempuan

Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan menjadi indikator utama ketidaksetaraan gender dalam dunia kerja. Pembangunan berbasis gender menitikberatkan pada prinsip *equal pay for equal work*, yakni upah yang setara untuk pekerjaan yang setara nilainya. Selain itu, pendekatan ini juga mengupayakan penghapusan diskriminasi di tempat kerja dan membuka akses perempuan terhadap jabatan manajerial serta bidang pekerjaan yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan dapat dikurangi secara sistemik.

Menurut March *et al* (1999) menyatakan bahwa pembangunan yang efektif harus mampu mengintegrasikan analisis gender dalam setiap tahap perencanaan, mulai dari identifikasi masalah, formulasi kebijakan, hingga implementasi dan evaluasi.

March *et al* (1999) juga membedakan antara dua jenis kebutuhan gender:

1. Kebutuhan Gender Praktis (Practical Gender Needs) adalah kebutuhan yang muncul dari peran tradisional perempuan, seperti akses air bersih, perawatan anak, dan fasilitas kesehatan.
2. Kebutuhan Gender Strategis (Strategic Gender Needs) adalah kebutuhan yang bertujuan untuk mengubah posisi perempuan dalam masyarakat, misalnya melalui peningkatan akses ke pendidikan dan partisipasi politik.

Menurut *United Nations* (2017) perencanaan pembangunan berbasis gender tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan publik, karena program yang responsif gender cenderung lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.3.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Menurut HumanDevelopmentReport (1995) Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang dirancang untuk menilai kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan manusia. IPG merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih luas, tetapi fokus utamanya adalah pada perbandingan gender. IPG mengukur tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. Dalam dimensi kesehatan, IPG sering kali diukur melalui indikator seperti harapan hidup saat lahir. Untuk dimensi pendidikan, indikator yang digunakan meliputi rata-rata tahun sekolah dan tingkat pendaftaran di berbagai jenjang pendidikan. Sedangkan untuk dimensi partisipasi ekonomi, IPG mengukur partisipasi angkatan kerja dan pendapatan. Dengan menggunakan IPG, kita dapat mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan gender dalam pembangunan, serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan laki-laki secara seimbang. Semakin dekat nilai IPG ke angka 100, semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin jauh jarak angka dari 100, semakin besar perbedaan kesetaraan antara kedua gender tersebut. Angka 100 dianggap sebagai standar ideal yang mencerminkan kesetaraan yang sempurna.

Rumus untuk menghitung Indeks Pembangunan Gender (IPG) melibatkan perbandingan antara indeks pembangunan manusia (IPM) untuk perempuan dan laki-laki Wisnujati (2020). Secara umum, rumusnya adalah :

Formula IPG (Indeks Pembangunan Gender)

Rumus IPG (Indeks Pembangunan Gender):

$$IPG = (IPM \text{ perempuan} / IPM \text{ laki-laki}) \times 100$$

Keterangan:

- IPG = Indeks Pembangunan Gender
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- $IPM_{\{\text{perempuan}\}}$ = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk perempuan
- $IPM_{\{\text{laki-laki}\}}$ = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk laki-laki

IPG = 100: Menunjukkan bahwa antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan dalam hal pembangunan manusia (kesetaraan gender sempurna).

IPG > 100: Menunjukkan bahwa perempuan memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yang mungkin mengindikasikan kondisi yang lebih baik bagi perempuan dalam beberapa dimensi pembangunan.

IPG < 100: Menunjukkan bahwa laki-laki memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang mungkin menunjukkan ketimpangan gender yang lebih menguntungkan bagi laki-laki Wisnujati (2020).

2.3.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Menurut Iskandar & Hamid (2020) merupakan ukuran yang menilai sejauh mana perempuan terlibat secara aktif dalam bidang ekonomi dan politik. Indeks ini mencerminkan kesetaraan gender, khususnya dalam aspek partisipasi politik dan proses pengambilan keputusan, yang dapat dilihat dari perbandingan proporsi perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif. IDG menunjukkan tingkat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas ekonomi. Semakin tinggi nilai IDG di suatu provinsi, semakin seimbang pula pencapaian antara laki-laki dan perempuan pada komponen-komponennya. Setiap perubahan dalam komponen penyusun dapat mempengaruhi naik turunnya nilai IDG dan peringkat wilayah tersebut.

Dimensi utama dalam IDG mencakup:

1. Jumlah perempuan yang aktif di lembaga legislatif, diukur melalui persentase keterwakilan laki-laki dan perempuan di parlemen.

2. Jumlah perempuan yang bekerja dan mampu mengambil keputusan secara mandiri dalam ranah pekerjaan.
3. Distribusi pendapatan yang diukur melalui kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan.

Untuk menghitung IDG, langkah awal yang dilakukan adalah menghitung EDEP (indeks dari tiap komponen), yang memperlihatkan tingkat pemerataan distribusi berdasarkan persentase masing-masing gender. Nilai EDEP dari setiap komponen kemudian dibagi dengan angka 50, yang dianggap sebagai kondisi ideal distribusi gender pada tiap komponen. Komponen pengambilan keputusan mencakup indikator pekerja manajerial/administratif dan profesional/teknisi. Sementara itu, komponen keterwakilan di parlemen mencakup jumlah anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota. Penghitungan IDG dilakukan melalui metode khusus yang menggabungkan semua indikator tersebut.

Yaitu seperti ini :

$$IDG = \frac{1}{3} (I_{par} + I_{Dm} + i_{inc-dis})$$

Di mana

I_{par} = Indeks keterwakilan di parlemen

I_{Dm} = Indeks Pengambilan Keputusan

$i_{inc-dis}$ = Indeks distribusi pendapatan

2.3.3.1 Partisipasi Ekonomi

Ussyarovi & Siskarossa Ika Oktora (2023) menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah keterlibatan mereka dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan memperbaiki harkat serta martabat perempuan di masyarakat. Konsep pemberdayaan perempuan menekankan pada proses pemberian kemampuan kepada perempuan agar mereka dapat mandiri, serta mendorong dan memotivasi setiap individu untuk memiliki kemampuan dalam menentukan pilihan hidup

mereka. Pemberdayaan perempuan ditujukan kepada kelompok atau lapisan masyarakat yang kurang beruntung, sebagai upaya untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan.

Masruchiyah & Laratmase (2023) pemberdayaan ekonomi perempuan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, mengurangi tingkat kemiskinan, serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dalam mengembangkan potensi diri mereka. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia sejak lama. Seiring dengan perkembangan zaman, peran perempuan dalam sektor ekonomi semakin diakui dan menjadi elemen yang kian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.. Ussyarovi & Siskarossa Ika Oktora (2023) menjelaskan bahwa peran dan kontribusi perempuan adalah faktor kunci dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada seiring berjalannya transformasi ekonomi. Berbagai upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dilakukan untuk meningkatkan mutu partisipasi perempuan dalam perekonomian. Banyak perempuan mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia dengan berpartisipasi dalam berbagai sektor, Perempuan berperan dalam berbagai sektor pekerjaan, seperti di instansi pemerintah, pertanian, perdagangan, kerajinan, perikanan, sektor jasa, serta bidang lainnya. Pemberdayaan ekonomi perempuan membuka peluang bagi mereka untuk memegang tanggung jawab atas kehidupan pribadi dan keluarganya dalam jangka panjang, tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti memperluas akses perempuan terhadap informasi sumber daya alam serta meningkatkan literasi digital bagi perempuan pelaku usaha. Dalam mengukur tingkat pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi, terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan. Penelitian ini memilih dua indikator utama, yaitu rasio perempuan yang bekerja di bidang profesional serta rasio perempuan yang menempati posisi manajerial.

Kedua jenis pekerjaan ini merujuk pada klasifikasi yang ditetapkan dalam Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) Badan Pusat Statistik (2015) :

1) Tenaga profesional adalah kelompok utama profesi dalam kategori ini menuntut penguasaan pengetahuan, keterampilan tingkat lanjut, serta pengalaman dalam bidang-bidang seperti ilmu alam, ilmu hayati, maupun ilmu sosial dan humaniora. Seorang tenaga profesional diharapkan mampu mengembangkan serta menerapkan konsep keilmuan yang dimiliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan, serta mampu menyusun dan menyampaikan materi secara sistematis. Jenis pekerjaan yang masuk dalam kelompok ini antara lain peneliti di bidang sains, matematika, dan teknik; peneliti di bidang kesehatan dan ilmu hayati; peneliti ilmu sosial; tenaga pengajar; ahli hukum; ahli di bidang bisnis; serta berbagai profesi profesional lainnya.

2) Pejabat Lembaga Legislatif, Pejabat Tinggi dan Manajer Tenaga kerja yang ada dalam golongan pokok ini memiliki tugas untuk membuat keputusan, merumuskan, mengarahkan dan memberi saran mengenai kebijakan pemerintah dan kebijakan organisasi tertentu. Pekerjaan yang masuk kedalam golongan pokok ini meliputi: pejabat lembaga legislatif dan pemerintah, manajer perusahaan dan manajer umum.

2.3.3.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan konsep yang menggambarkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses perpolitikan. Ini mencakup keseluruhan tahapan kebijakan, mulai dari proses pembuatan keputusan hingga evaluasi akhir Silvi et al., (2024) partisipasi politik adalah kegiatan individu atau kelompok yang secara sadar dan aktif mengambil bagian dalam kehidupan politik. Wujud konkret dari partisipasi politik dapat bermacam-macam, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, menghadiri kegiatan kampanye, menjalin komunikasi dengan pejabat pemerintah, atau berinteraksi dengan anggota parlemen. Inti dari partisipasi politik adalah upaya warga untuk secara langsung atau tidak langsung memengaruhi arah dan kebijakan pemerintahan. Melalui partisipasi politik, warga negara tidak sekadar menjadi pemilih pasif, melainkan berperan aktif dalam mengawal dan membentuk proses demokrasi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan

yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab.

Partisipasi politik perempuan dapat terjadi dalam bentuk konvensional maupun non-konvensional. Namun, partisipasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti peluang resmi yang menentukan apakah perempuan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam arena politik, sumber daya sosial yang menunjukkan apakah mereka memiliki kemampuan untuk berpartisipasi, serta motivasi pribadi atau keinginan perempuan untuk terlibat secara aktif di dalamnya Silvi et al, (2024)

Indikator ini mengukur jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan dan lembaga legislatif. Menurut Darmastuti (2022) menyatakan kehadiran perempuan dalam politik dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan gender dan memperkuat sistem demokrasi.

Partisipasi politik perempuan berdasarkan pengkategorian Darmastuti (2022) terdiri atas:

1. Apatitis, yaitu tidak aktif, dan menarik diri dari proses politik.
2. Spectator, yaitu pernah memilih dalam pemilihan umum
3. Gladiator, yang terlibat dalam proses politik; dan
4. Pengeritik, yang berpartisipasi dalam bentuk non-konvensional.

Menurut klasifikasi yang dikembangkan oleh (Darmastuti, 2022), partisipasi politik perempuan dapat dibedakan menjadi empat tipe, berdasarkan tingkat kesadaran politik dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah:

1. Tipe aktif, yaitu perempuan yang memiliki tingkat kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang tinggi.
2. Tipe apatis (pasif-tertekan), yaitu mereka yang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah yang rendah.
3. Tipe militan radikal, yakni individu dengan kesadaran politik yang tinggi tetapi minim kepercayaan terhadap pemerintah.

4. Tipe pasif, yaitu mereka yang memiliki kesadaran politik rendah namun justru memiliki kepercayaan tinggi terhadap pemerintah.

2.3.3.3 Penguasaan Sumber Daya Ekonomi

Klasen (2018) penguasaan sumber daya ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesetaraan gender dalam konteks ekonomi. Indikator ini mencakup proporsi pendapatan yang diperoleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Ketimpangan pendapatan antara gender tidak hanya mencerminkan perbedaan dalam upah, tetapi juga mencerminkan akses yang tidak setara terhadap peluang kerja, pendidikan, dan sumber daya lainnya yang mendukung partisipasi ekonomi.

Hook & Pettit (2008) menekankan bahwa ketimpangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan mencerminkan adanya diskriminasi gender dalam akses ke pekerjaan yang layak dan kesempatan ekonomi. Penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah memasuki pasar kerja dalam jumlah yang signifikan, mereka masih menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pendapatan perempuan sering kali tidak mendapatkan perlakuan yang setara dengan laki-laki. Bentuk ketidaksetaraan ini dapat muncul dalam berbagai aspek, seperti perbedaan upah untuk pekerjaan yang sama, keterbatasan akses terhadap jabatan manajerial, serta adanya stereotip gender yang membatasi pilihan karier bagi perempuan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hal ini adalah perbandingan pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Ketimpangan pendapatan tersebut mencerminkan adanya ketidakadilan gender dalam memperoleh pekerjaan yang layak serta dalam mengakses peluang ekonomi yang setara.

2.3.4 Program Pembangunan Responsif Gender (PPRG)

Elson et al. (2018) menyatakan bahwa Program Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bertujuan untuk mengintegrasikan analisis gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran pembangunan. PPRG tidak hanya berfokus pada pencapaian kesetaraan gender sebagai tujuan akhir, tetapi juga bertindak sebagai alat untuk memastikan bahwa semua program pembangunan memperhitungkan

kebutuhan dan kepentingan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di setiap tahap.

Menurut Bardasi & Gornick (2008) pendekatan responsif gender ini memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik kelompok masyarakat yang berbeda, termasuk perbedaan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan kontrol atas sumber daya ekonomi. Dengan demikian, kebijakan dan program yang dihasilkan menjadi lebih inklusif, efektif, dan efisien dalam mengurangi ketimpangan gender yang ada.

Selain itu, PPRG juga memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di sektor publik dan swasta. Sebagai contoh, penerapan anggaran responsif gender di sektor pendidikan dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk beasiswa perempuan di bidang yang selama ini didominasi oleh laki-laki, seperti S.STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Oleh karena itu, program ini akan memperhatikan program-program yang berbasis gender dari periode 2019-2023 yang datanya bersumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan di Bappeda Provinsi Lampung.

2.3.5 Alokasi Anggaran Biaya Kesehatan Reproduksi

Alokasi anggaran untuk kesehatan reproduksi merupakan salah satu komponen kunci dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak, serta dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa indikator seperti :

2.3.5.1 Penyediaan Alat Kontrasepsi

Menurut World Health Organization (2012) penyediaan alat kontrasepsi yang memadai dan beragam merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan serta mendukung perencanaan keluarga yang efektif. Program keluarga berencana yang responsif gender dapat membantu pasangan, khususnya perempuan, dalam mengendalikan jumlah dan jarak kelahiran, yang pada akhirnya meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat

Pendidikan dan sosialisasi mengenai kontrasepsi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga. Nations (2014) menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang manfaat kontrasepsi cenderung memiliki tingkat adopsi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan angka kelahiran yang tidak direncanakan.

2. Ketersediaan Berbagai Jenis Alat Kontrasepsi

Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menyediakan alat kontrasepsi, termasuk klinik kesehatan, Diversifikasi jenis kontrasepsi, seperti pil, suntik, implan, dan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), memungkinkan individu untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan mereka. Penyediaan alat kontrasepsi yang beragam juga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan keberhasilan program keluarga berencana di masyarakat (Nations, 2014).

2.3.5.2 Hak Kesehatan

Hak kesehatan yaitu hak asasi manusia yang menjamin setiap individu untuk menikmati tingkat kesehatan yang baik dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Ini mencakup hak untuk mendapatkan perawatan medis, pencegahan penyakit, dan akses terhadap informasi kesehatan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang informasional. Hak kesehatan juga mencakup aspek lingkungan yang mendukung kesehatan, seperti air bersih, sanitasi, dan kondisi hidup yang layak. Dalam konteks internasional, hak kesehatan diakui dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang menekankan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan realisasi hak ini bagi semua orang tanpa diskriminasi.

Menurut *National Reproductive Health Development Policy and Strategy (2017)* investasi yang memadai dalam kesehatan reproduksi tidak hanya dapat menurunkan angka kematian ibu (Maternal Mortality Rate/MMR), tetapi juga

meningkatkan kualitas hidup perempuan secara keseluruhan, termasuk kesehatan fisik dan mental mereka.

1. Angka Kematian Maternal

Tingginya angka kematian maternal, terutama di negara berkembang, menjadi indikator penting yang mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk layanan kesehatan ibu dan anak. Penyebab utama kematian maternal, seperti komplikasi saat persalinan, pendarahan hebat, dan infeksi, dapat diminimalkan dengan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan yang berkualitas.

2. Akses terhadap Layanan Kesehatan

Indikator yang Harvey (2004) menekankan pentingnya akses universal terhadap layanan kesehatan reproduksi, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan. Ketika perempuan memiliki akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan reproduksi, mereka dapat menghindari risiko kesehatan yang serius, merencanakan kehamilan dengan lebih baik, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka secara keseluruhan. Sebagai contoh, program seperti pemberian layanan kesehatan ibu gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan angka kunjungan ibu hamil untuk pemeriksaan antenatal dan persalinan yang aman.

2.3.6 Penitipan Anak

Heckman (2006) menyatakan bahwa akses terhadap layanan penitipan anak yang terjangkau, berkualitas, dan aman dapat mendukung partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, terutama bagi ibu yang memiliki anak usia dini. Penitipan anak yang efektif memungkinkan perempuan untuk kembali bekerja atau melanjutkan pendidikan mereka, sehingga berkontribusi pada peningkatan pendapatan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga.

Secara umum alasan menitipkan anak di luar rumah adalah salah satu dari sebab-sebab berikut.

1. Peningkatan jumlah ibu yang bekerja dengan anak usia sekolah

Dalam beberapa dekade terakhir, jumlah ibu yang bekerja di sektor formal maupun informal terus meningkat. Hal ini menciptakan kebutuhan yang mendesak akan layanan penitipan anak yang profesional dan terjangkau. Menurut Chambers (2022) negara-negara yang memiliki kebijakan penitipan anak yang baik cenderung memiliki tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan yang lebih tinggi.

2. Kondisi ekonomi keluarga

Layanan penitipan anak yang terjangkau dapat meringankan beban ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah. Subsidi pemerintah atau program penitipan anak gratis di tempat kerja dapat menjadi solusi untuk memastikan akses yang merata bagi semua kelompok masyarakat Chamber (2022).

2.4 Hubungan antar variabel

a. Partisipasi Politik Perempuan (Y1)

Variabel yang mengukur keterlibatan perempuan dalam proses politik di Lampung menjadi indikator penting untuk menilai tingkat kesetaraan dan representasi gender dalam ranah perpolitikan. Tingkat pendidikan berpengaruh dalam memberdayakan perempuan untuk memahami kompleksitas sistem politik dan meningkatkan peluang keterlibatan dalam berbagai tahapan proses politik. Peluang partisipasi perempuan meliputi representasi dalam lembaga legislatif, keterlibatan dalam partai politik, serta peran dalam formulasi dan advokasi kebijakan publik. Dengan meningkatnya partisipasi, struktur kepemimpinan politik di Lampung diharapkan dapat menjadi lebih inklusif dan beragam. Perempuan membawa perspektif unik yang lebih peka terhadap isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan kesejahteraan keluarga. Tantangan utama meliputi hambatan struktural dan kultural, seperti stereotipe sosial dan beban ganda antara peran domestik dan publik. Pengukuran variabel ini tidak sekadar melihat jumlah perempuan yang terlibat, melainkan juga kualitas keterlibatan dan pengaruh mereka dalam proses pengambilan keputusan menuju demokrasi yang lebih berkeadilan (Ussyarovi & Siskarossa Ika Oktora, 2023).

b. Jumlah Perempuan di Angkatan Kerja (Y2)

Variabel yang mengukur keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi merupakan indikator penting untuk memahami dinamika sosial-ekonomi dan pemberdayaan gender di suatu wilayah. Faktor pendidikan berpengaruh untuk menjadi prasyarat utama yang menentukan kapasitas dan peluang perempuan untuk berkontribusi secara produktif dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari industri, perdagangan, hingga kewirausahaan. Tingkat upah dan kesempatan yang setara menjadi faktor kritis yang memengaruhi motivasi dan kemampuan perempuan untuk memasuki ranah ekonomi, dengan mempertimbangkan tantangan struktural seperti diskriminasi dan beban ganda antara pekerjaan domestik dan profesional. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi tidak sekadar berimplikasi pada peningkatan pendapatan individual, melainkan juga memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap kesejahteraan keluarga dan dinamika sosial masyarakat. Ketika perempuan memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, mereka cenderung mengalokasikan pendapatannya secara lebih strategis untuk kebutuhan pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan investasi jangka panjang. Partisipasi ekonomi perempuan juga berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, mendiversifikasi struktur ekonomi, serta menciptakan model pembangunan yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, variabel ini bukan sekadar potret statistik, melainkan cermin transformasi sosial yang fundamental dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang kehidupan (Limbong & Sakinah, 2024).

c. Proporsi Upah Laki-laki terhadap Perempuan (Y3)

Rasio kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan merupakan indikator kritis untuk mengukur ketidaksetaraan gender dalam lingkungan kerja, yang secara sistematis menggambarkan perbedaan kompensasi berdasarkan jenis kelamin. Pengaruh kesenjangan upah berdampak secara signifikan pada struktur sosial ekonomi, di mana perempuan mengalami hambatan struktural dalam memperoleh penghasilan yang setara dengan laki-laki pada pekerjaan dengan

kualifikasi sama. Faktor pendidikan dan jenis pekerjaan menjadi variabel utama yang memengaruhi besaran kesenjangan upah, dengan sejumlah sektor masih menunjukkan bias gender yang kuat. Implikasi dari kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada individu perempuan, melainkan juga pada dinamika kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Pengaruh jangka panjang dari ketimpangan upah ini dapat menurunkan produktivitas ekonomi dan menciptakan siklus ketidaksetaraan yang berkelanjutan. Dengan menutup kesenjangan upah, perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup, mengakses pendidikan lanjut, dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan ekonomi. Transformasi sistemik melalui regulasi, pendidikan, dan perubahan budaya kerja menjadi kunci utama dalam mengatasi akar permasalahan kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan (Chandra et al., 2024).

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang sejalan dengan topik penelitian antara lain :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis (Tahun)	Variabel	Kesimpulan
1	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Usaha Mikro	Sari & Hidayati (2018)	Usaha Mikro, Pemberdayaan Ekonomi	Pemberdayaan melalui usaha mikro meningkatkan kesejahteraan ekonomi perempuan.
2	Peran Koperasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Subramaniam & Noor (2019)	Koperasi, Ekonomi Perempuan	Koperasi berperan penting dalam meningkatkan pendapatan perempuan melalui akses ke pasar.

No	Judul Penelitian	Penulis (Tahun)	Variabel	Kesimpulan
3	Pengaruh Pelatihan Kewirausahaan terhadap Ekonomi Perempuan	Pratama & Sumarni (2020)	Pelatihan Kewirausahaan, Pendapatan Perempuan	Pelatihan kewirausahaan meningkatkan keterampilan dan pendapatan perempuan.
4	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Dewi & Fatmawati (2017)	Faktor Sosial, Ekonomi, Pendidikan	Faktor pendidikan dan sosial sangat mempengaruhi pemberdayaan ekonomi perempuan.
5	Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Pedesaan	Harahap & Junaidi (2016)	Usaha Kecil, Pemberdayaan Ekonomi	Usaha kecil dan dukungan komunitas membantu pemberdayaan perempuan di pedesaan.
6	Pengaruh Akses Pendidikan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Salim & Kartini (2018)	Akses Pendidikan, Kemandirian Ekonomi	Akses pendidikan yang lebih baik meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan.
7	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam	Rizki & Utami (2021)	Sumber Daya Alam, Ekonomi Perempuan	Pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi sumber

No	Judul Penelitian	Penulis (Tahun)	Variabel	Kesimpulan
				pemberdayaan ekonomi perempuan.
8	Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Kota	Yulianto & Pertiwi (2019)	Program Pemberdayaan, Kesejahteraan Ekonomi	Program pemberdayaan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan perempuan.
9	Pengaruh Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi	Ningsih & Kurniawati (2017)	Partisipasi, Pembangunan Ekonomi	Partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi meningkatkan kualitas hidup mereka.
10	Peran Teknologi Informasi dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Amalia & Sutrisno (2020)	Teknologi Informasi, Kemandirian Ekonomi	Teknologi informasi meningkatkan akses perempuan terhadap pasar dan peluang usaha.

2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan hubungan logis antara pendidikan sebagai variabel bebas (independen) dengan indikator-indikator pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai variabel terikat (dependen), yang meliputi partisipasi politik perempuan, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dan proporsi upah perempuan terhadap laki-laki. Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia sebagaimana dijelaskan dalam teori Human

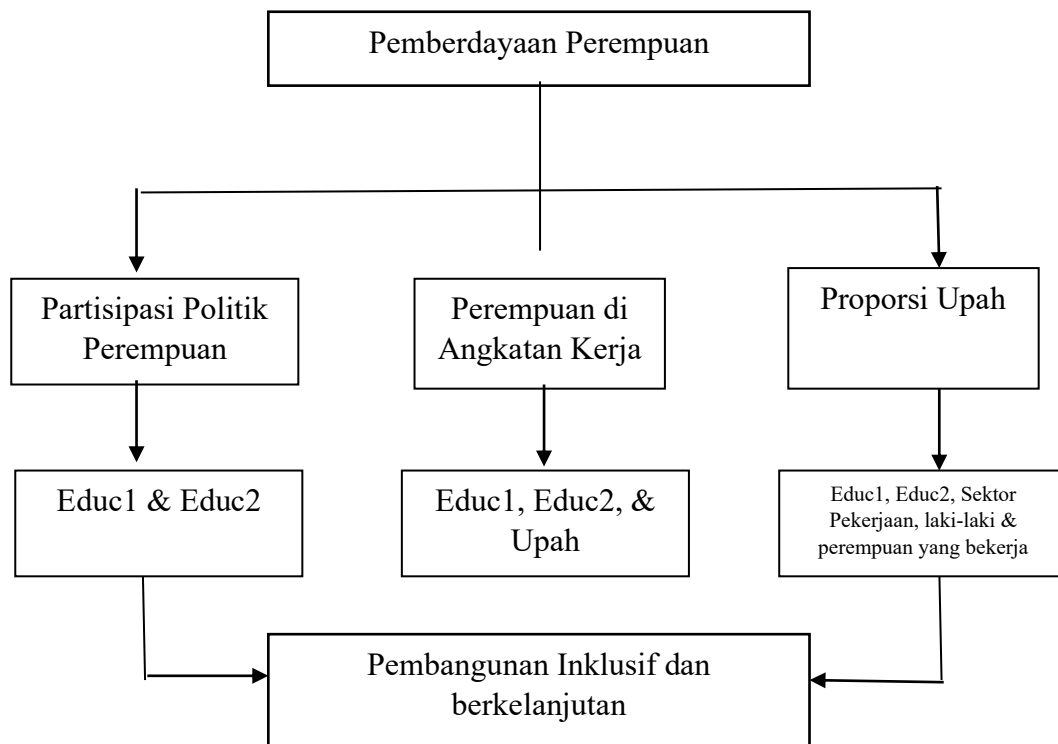
Capital, di mana peningkatan tingkat pendidikan diyakini mampu meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan daya saing perempuan di pasar kerja. Pendidikan yang lebih tinggi juga memungkinkan perempuan memperoleh pekerjaan formal dengan pendapatan yang lebih baik, serta meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan baik di ranah ekonomi maupun politik.

Dalam dimensi politik, pendidikan mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan, maka semakin tinggi pula kemungkinan ia memiliki kesadaran politik, keberanian untuk terlibat dalam proses politik, serta kemampuan dalam memahami isu-isu kebijakan. Hal ini sejalan dengan teori Critical Mass yang menyatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga politik akan lebih efektif apabila mencapai jumlah kritis, yakni minimal 30% dari total anggota legislatif, agar dapat mempengaruhi pengambilan keputusan secara signifikan. Pada dimensi ekonomi, pendidikan memungkinkan perempuan memperoleh akses kerja yang lebih luas dan layak, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan. Pendidikan juga berkaitan erat dengan upah yang diterima. Secara teoritis, semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula potensi pendapatan seseorang. Namun demikian, dalam praktiknya, kesenjangan gender dalam pengupahan masih terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini juga menguji apakah pendidikan dan jenis pekerjaan berpengaruh terhadap proporsi upah perempuan dibandingkan laki-laki.

Ketiga indikator tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengukur pemberdayaan ekonomi perempuan yang menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditekankan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender. Selain itu, untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga mempertimbangkan capaian provinsi Lampung dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), sebagai alat ukur kuantitatif terhadap perkembangan pembangunan berbasis gender. Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, maka semakin besar pula kemungkinan meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan, yang tercermin

melalui partisipasi politik, partisipasi di angkatan kerja, serta proporsi upah yang lebih setara.

Untuk mempermudah alur berfikir, peneliti menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 4. Kerangka Berfikir

2.7 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

2.7.1 Hipotesis Model Partisipasi Politik Perempuan

- Diduga EDUC1 berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan di Provinsi Lampung.
- Diduga EDUC2 tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik perempuan di Provinsi Lampung.

2.7.2 Hipotesis Model Tingkat Partisipasi Perempuan di Angkatan Kerja

- Diduga EDUC1 tidak berpengaruh signifikan terhadap perempuan di angkatan kerja Provinsi Lampung.

- b. Diduga EDUC2 berpengaruh signifikan terhadap perempuan diangkatan kerja Provinsi Lampung.
- c. Diduga Upah berpengaruh signifikan terhadap perempuan diangkatan kerja Provinsi Lampung.

2.7.3 Hipotesis Model Proporsi Upah

- a. Diduga EDUC1 tidak berpengaruh signifikan terhadap proporsi upah perempuan terhadap laki-laki di Provinsi Lampung.
- b. Diduga EDUC2 berpengaruh signifikan terhadap peningkatan proporsi upah perempuan terhadap laki-laki di Provinsi Lampung.
- c. Diduga laki-laki dan perempuan yang bekerja berpengaruh signifikan terhadap proporsi upah di Provinsi Lampung.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di Provinsi Lampung selama periode 2019–2023. Penelitian ini memanfaatkan metode analisis regresi data panel dengan pendekatan pooled data, yang merupakan kombinasi antara data cross section (lintas kabupaten/kota) dan time series (rentang waktu tahunan). Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), serta instansi terkait lainnya. Data diperoleh melalui publikasi daring di situs resmi www.bps.go.id dan sumber institusi terkait yang kredibel. Pemilihan sumber data didasarkan pada kriteria keterkinian, relevansi terhadap variabel penelitian, serta kelengkapan data dalam rentang waktu lima tahun (2019–2023).

Penelitian ini menggunakan tiga variabel dependen (Y), yaitu: (1) Partisipasi Politik Perempuan (Y_1), yang diukur berdasarkan persentase keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota; (2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Y_2), yang diukur melalui indikator TPAK perempuan di masing-masing wilayah; dan (3) Proporsi Upah Perempuan terhadap Laki-laki (Y_3), yang dihitung dari rasio rata-rata upah perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Sementara itu, variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) EDUC1 yaitu proporsi perempuan yang menamatkan pendidikan tingkat SMA, dan (2) EDUC2 yaitu proporsi perempuan yang menamatkan

pendidikan perguruan tinggi (universitas). Selain itu, terdapat pula variabel kontrol seperti jumlah perempuan yang bekerja. Sektor lapangan (sekind, sekperd, sekperta), serta jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang bekerja, untuk menguji pengaruhnya terhadap proporsi upah.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana setiap variabel didefinisikan secara spesifik dan diukur secara kuantitatif agar dapat dianalisis secara empiris. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen, independen, dan kontrol, yang dirinci sebagai berikut:

Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup 9 variabel utama :

3.2.1 Variabel Dependen

- a. Variabel Partisipasi Politik Perempuan pada periode penelitian 2019-2023 didefinisikan sebagai jumlah perempuan yang menduduki kursi legislatif di DPRD tingkat kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Variabel ini menunjukkan sejauh mana perempuan terlibat dalam proses politik formal dan diukur dalam satuan jumlah orang.
- b. Variabel Dependen yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah jumlah penduduk perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja (yang bekerja) pengukuran dilakukan dalam bentuk jumlah orang.
- c. Variabel Dependen yaitu Proporsi Upah Perempuan terhadap Laki-laki adalah merujuk pada perbandingan jumlah atau persentase upah yang diterima oleh pekerja laki-laki dan pekerja perempuan dalam suatu periode waktu tertentu yang diukur dalam satuan persen (%).

3.2.2 Variabel Independen

- a. Variabel Independen yaitu EDUC1 (SMA) menunjukkan jumlah penduduk perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas atau sederajat (SMA/MA/SMK). Penduduk dengan tingkat pendidikan ini adalah mereka yang pernah bersekolah dan lulus pada jenjang SMA atau sederajat, dibuktikan

dengan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Pengukuran dilakukan dalam satuan persen (%).

- b. Variabel EDUC2 (Perguruan Tinggi) adalah menunjukkan jumlah penduduk perempuan yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, baik diploma, sarjana, magister, maupun doktor. Penduduk dengan tingkat pendidikan ini adalah mereka yang pernah berkuliah dan lulus pada jenjang pendidikan tinggi, dibuktikan dengan adanya ijazah atau sertifikat kelulusan. Pengukuran dilakukan dalam satuan persen (%).
- c. Variabel Independen yaitu Sektor Lapangan adalah Jenis Sektor Pekerjaan Perempuan (SEKIND, SEKPERD, dan SEKPERTA) yang menggambarkan distribusi sektor pekerjaan yang ditekuni oleh perempuan di masing-masing kabupaten/kota. SEKIND menunjukkan jumlah perempuan yang bekerja di sektor industri, SEKPERD menunjukkan jumlah perempuan yang bekerja di sektor perdagangan, dan SEKPERTA menunjukkan jumlah perempuan yang bekerja di sektor pertanian. Ketiga variabel ini mencerminkan kecenderungan sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja perempuan dan masing-masing diukur dalam satuan jumlah orang.
- d. Variabel Independen yaitu Jumlah Laki-laki yang Bekerja menunjukkan jumlah penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang termasuk kategori bekerja, yaitu melakukan kegiatan ekonomi paling sedikit satu jam secara terus-menerus dalam seminggu terakhir dengan tujuan memperoleh penghasilan atau keuntungan. Kegiatan ini mencakup pekerjaan berupah/gaji, usaha sendiri. Pengukuran dilakukan dalam satuan orang.
- e. Variabel Independen yaitu Perempuan yang Bekerja menunjukkan jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang termasuk kategori bekerja, yaitu melakukan kegiatan ekonomi paling sedikit satu jam secara terus-menerus dalam seminggu terakhir dengan tujuan memperoleh penghasilan atau keuntungan. Menurut BPS, kegiatan ini mencakup pekerjaan berupah/gaji, usaha sendiri. Pengukuran dilakukan dalam satuan orang.

3.3 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Lampung untuk seluruh kabupaten/kota. Data diperoleh melalui situs resmi www.bps.go.id. Waktu penelitian di mulai dari 2019-2023. Dengan memilih periode ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan terkini tentang kondisi yang ada. Selain itu, periode ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat dampak dari kebijakan dan program pembangunan yang telah diterapkan, sehingga hasil penelitian dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di daerah tersebut.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder seperti Badan Pusat Statistika (SAKERNAS) Provinsi Lampung dan instansi terkait lainnya. Data yang diambil data yang relevan dan terbaru yang digunakan dari perpustakaan BPS Provinsi Lampung.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, yaitu metode yang menggabungkan data deret waktu (time series) dengan data lintas individu atau sektor (cross section) dari tahun 2019-2023 pada 15 Kabupaten/kota di provinsi Lampung. Penggunaan data panel memiliki keunggulan dalam mengurangi potensi bias akibat variabel yang terabaikan (omitted variables), yaitu kondisi ketika model tidak memasukkan variabel penting yang seharusnya diperhitungkan. Selain itu, metode ini juga lebih efektif dalam mengatasi masalah interkorelasi antar variabel independen, yang dapat mengganggu keakuratan hasil estimasi regresi. Regresi panel sendiri merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menilai pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.

Keunggulan Data Panel Menurut Gujarati, 2015 mencakup beberapa aspek penting dalam analisis data panel. Berikut adalah beberapa keunggulan tersebut:

1. Menggabungkan data cross-section dan time-series sehingga total observasi meningkat hal ini membuat estimasi menjadi lebih efisien, dengan variabilitas yang lebih tinggi, lebih banyak degree of freedom, dan

pengurangan multikolinearitas.

2. Memungkinkan kontrol heterogenitas individu/unit data panel memungkinkan analisis yang memperhitungkan karakteristik unik tiap subjek (misalnya individu, perusahaan), baik dengan Fixed Effects maupun Random Effects.
3. Efektif untuk menganalisis dinamika perubahan dari waktu ke waktu struktur panel memungkinkan studi fenomena seperti hukuman pengangguran, mobilitas tenaga kerja, dan perubahan jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Mendeteksi efek yang tidak terlihat pada data cross-section atau time-series saja beberapa efek hanya dapat diidentifikasi dengan data panel karena strukturnya yang mengandung informasi lebih mendalam.
5. Memungkinkan pemodelan perilaku yang lebih kompleks Misalnya, model tentang skala ekonomi dan perubahan teknologi lebih mudah dianalisis dengan panel data daripada hanya dengan jenis data tunggal.

Kelemahan Data Panel Menurut Gujarati, 2015 mencakup beberapa dalam analisis data panel. Berikut adalah beberapa kelemahan tersebut:

1. Tingginya kebutuhan data (N dan T) yang dapat menjadi sulit atau mahal untuk diperoleh.
2. Kompleksitas estimasi (pemilihan model yang benar Fixed vs Random Effects, uji Hausman, asumsi heteroskedastisitas dan autokorelasi).
3. Isu spesifikasi model yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang bisa menyebabkan bias estimasi.

Bentuk persamaan struktural penelitian ini sebagai berikut:

Model 1

$$PPolitik_{wit} = \beta_0 + \beta_1 Educ1_{it} + \beta_2 Educ2_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

$PPolitik_{wit}$ = Partisipasi politik

$Educ1_{it}$ = Tingkat Pendidikan SMA

$Educ2_{it}$ = Tingkat Pendidikan perguruan tinggi

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap Partisipasi Politik.

ϵ = Error

i = Kabupaten/kota

t = Tahun

Model 2

$$TPAK_P_{it} = \beta_0 + \beta_1 Educ1_{it} + \beta_2 Educ2_{it} + \beta_3 U_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

$TPAK_P_{it}$ = Perempuan di ngkatan Kerja

$Educ1_{it}$ = Tingkat Pendidikan SMA

$Educ2_{it}$ = Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi

U_{it} = Upah

β_0 : Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap $TPAK_P$

ϵ : Error term

i = Kabupaten/kota

t = Tahun

Model 3

$$\text{PropWage}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Educ1}_{it} + \beta_2 \text{Educ2}_{it} + \beta_3 \text{Sekind}_{it} + \beta_4 \text{Sekperd}_{it} + \beta_5 \text{Sekperta}_{it} + \beta_6 \text{Bekerja_L}_{it} + \beta_7 \text{Bekerja_P}_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

PropWage_{it} = Proporsi Upah Laki-laki Terhadap Perempuan

Educ1_{it} = Tingkat Pendidikan SMA

Educ2_{it} = Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi

Sekind_{it} = Sektor Industri

Sekperd_{it} = Sektor Perdagangan

Sekperta_{it} = Sektor Pertanian

Bekerja_L_{it} = Laki-laki yang bekerja

Bekerja_P_{it} = Perempuan yang bekerja

β₀: Konstanta

β₁, β₂, β₃, β₄, β₅, β₆, = Koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap Proporsi upah

ε: Error term

3.6 Teknik Estimasi Regresi Panel

Penelitian ini menggunakan teknik estimasi regresi panel linier untuk menganalisis data yang mencakup dua dimensi, yaitu waktu (time series) dan individu atau unit pengamatan (cross-section). Analisis dilakukan dengan membagi model menjadi tiga jenis, yaitu Model Efek Umum (Common Effect Model), Model Efek Tetap (Fixed Effect), dan Model Efek Acak (Random Effect).

1. Metode *Common Effect Model* (CEM)

Metode *kuadrat terkecil* (Ordinary Least Square/OLS) biasanya digunakan untuk menganalisis data *pooled*, dan merupakan pendekatan paling dasar dalam analisis data panel. Sebelum menjalankan regresi data panel, data *cross-section* dan *time series* perlu digabungkan terlebih dahulu dalam bentuk *pooled data* dengan menggunakan pendekatan OLS. Dalam metode ini, baik perbedaan antar individu maupun dimensi waktu tidak dipertimbangkan secara khusus.

2. Metode *Fixed Effect Model* (FEM)

Berasumsi bahwa setiap objek memiliki konstanta yang tetap nilainya untuk berbagai periode waktu. Pendekatan ini mempertimbangkan kemungkinan adanya masalah variabel yang diabaikan (*omitted variables*), di mana variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi perubahan pada intercept dalam analisis time series atau cross section. Dalam model ini, peneliti menambahkan variabel dummy untuk memungkinkan adanya variasi pada intercept. Model FEM mengasumsikan bahwa perbedaan antar unit dapat diidentifikasi melalui perbedaan nilai konstanta yang dimiliki. Estimasi dalam model Fixed Effect dapat dilakukan tanpa menggunakan pembobot atau dengan metode Least Square Dummy Variable (LSDV). Pembobotan ini bertujuan untuk mengurangi heterogenitas di antara unit cross section.

3. Metode *Random Effect Model* (REM)

Metode *Fixed Effect Model* (FEM) memiliki kelemahan, yaitu penggunaan variabel dummy dalam model dapat menyebabkan penurunan derajat kebebasan, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya efisiensi estimasi parameter. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat digunakan pendekatan *Random Effect Model* (REM), yang memanfaatkan variabel gangguan (*error term*) sebagai alternatif. REM dirancang untuk mengestimasi data panel dengan kemungkinan adanya korelasi antara kesalahan pengukuran pada dimensi waktu dan individu. Dalam penerapannya, metode yang paling sesuai untuk mengestimasi model *Random Effect* adalah *Generalized Least Square* (GLS).

3.7 Pengujian Model Panel

Untuk menguji kesesuaian model dari kedua teknik estimasi model dengan data panel, digunakan tiga uji, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Multiplier. Uji Chow berfungsi untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Sementara itu, Uji Hausman digunakan untuk memilih antara Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Terakhir, Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan apakah metode yang lebih tepat adalah Common Effect Model atau Random Effect Model.

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih model yang paling sesuai antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Dalam penelitian ini, pengujian Chow dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Eviews. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji Chow dirumuskan sebagai berikut:

H0: Common Effect Model.

Ha : *Fixed Effect Model*

Pengujian ini didasarkan pada nilai probabilitas dari *cross-section F*. Apabila nilai probabilitas tersebut melebihi tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, maka model yang tepat digunakan adalah *Common Effect Model*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F lebih kecil dari 0,05, maka terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, sehingga model yang lebih sesuai untuk diterapkan adalah *Fixed Effect Model*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini didasarkan pada perumusan hipotesis sebagai berikut:

H0: *Random Effect Model (REM)*

Ha: *Fixed Effect Model (FEM)*.

Kriteria Pengujian:

Jika probabilitas uji Hausman $> 0,05$, maka H0 diterima (menggunakan REM).

Jika probabilitas uji Hausman $< 0,05$, maka Ha ditolak (menggunakan FEM).

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan metode yang paling sesuai antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan hipotesis sebagai berikut:

H0 : *Common Effect Model*

Ha : *Random Effect Model*

Apabila probabilitas Breusch-Pagan $< \alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak artinya, teknik terbaik dalam mengestimasi regresi data panel adalah Random Effect Model. Sebaliknya, apabila probabilitas $> \alpha = 0.05$ maka H_a ditolak, artinya teknik terbaik dalam mengestimasi regresi data panel adalah Common Effect Model.

3.8 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linier berganda menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Agar suatu estimator dapat dianggap sebagai BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu estimator harus bersifat linear, tidak bias, dan memiliki varian terkecil. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji kolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik sangat penting untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan valid dan dapat diandalkan, sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan dengan akurat.

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual mengikuti distribusi normal, sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam analisis statistik parametrik (seperti statistik inferensial). Residual dikatakan berdistribusi normal apabila nilai residual yang telah distandarisasi mendekati nilai rata-ratanya. Untuk menilai normalitas residual, dapat digunakan analisis grafik. Selain itu, normalitas juga dapat diuji melalui metode statistik non-parametrik, seperti uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dalam uji ini, residual dianggap terdistribusi normal jika nilai signifikansinya melebihi 0,05.

Pendekatan grafis dapat dilakukan melalui *normal probability plot*, yaitu grafik yang membandingkan distribusi kumulatif dari data dengan distribusi normal. Jika distribusi data membentuk garis lurus diagonal, maka hasil plot residual akan dibandingkan terhadap garis tersebut. Keputusan dibuat berdasarkan kriteria sebagai berikut: apabila titik-titik data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika titik-titik data menyimpang jauh dari garis

diagonal atau tidak mengikuti polanya, maka model dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.8.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi jika terdapat korelasi tinggi antar variabel independen. Dalam konteks penelitian ini, jika ada beberapa variabel yang berkorelasi tinggi (misalnya, upah dan variabel lainnya), hal ini dapat menyebabkan masalah dalam estimasi model regresi. Ketika terjadi multikolinearitas, koefisien regresi tidak dapat diinterpretasikan dengan baik.

Metode Uji:

- a. Variance Inflation Factor (VIF)
- b. Tolerance Test Interpretasi

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel independen dalam model regresi berganda. Apabila terdapat dua variabel bebas yang memiliki korelasi sangat tinggi, maka hanya salah satu yang sebaiknya dimasukkan ke dalam model regresi. Korelasi dianggap tinggi jika nilai koefisien korelasinya (r) lebih dari 0,10. Sebaliknya, jika nilai korelasi antar variabel kurang dari 0,10, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari masalah multikolinieritas antar variabel bebas.

Untuk mengetahui apakah multikolinieritas terjadi, digunakan pengujian terhadap nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai toleransi. Toleransi mencerminkan sejauh mana variasi suatu variabel independen tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya dalam model. Indikasi adanya multikolinieritas muncul ketika nilai VIF berada antara 0,10 dan 10. Suatu model dinyatakan bebas dari multikolinieritas jika nilai toleransi ($1/VIF$) lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sebaliknya, apabila toleransi di bawah 0,10 dan VIF melebihi 10, maka model tersebut mengindikasikan adanya multikolinieritas dan tidak lolos pengujian.

3.8.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varian residual antara satu observasi dengan observasi lainnya. Model regresi yang ideal adalah model yang memenuhi asumsi homoskedastisitas, yaitu ketika varian residual bersifat konstan atau tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas adalah *White Test*.

3.9 Uji Statistik

Hasil dari uji t dan uji F akan digunakan untuk menentukan signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yang akan menjadi dasar untuk menarik kesimpulan tentang hubungan antara pendidikan, partisipasi politik, keberadaan perempuan di angkatan kerja, dan perbedaan upah.

3.9.1 Uji-t

Uji signifikansi parsial (Uji t) bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Uji ini digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel terikat. Proses pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai *t-hitung* dengan *t-tabel*. Jika nilai *t-hitung* lebih besar dari *t-tabel*, maka H_0 ditolak, yang berarti variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai *t-hitung* lebih kecil dari *t-tabel*, maka H_0 diterima, menandakan bahwa variabel independen tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a : Terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (p-value) hasil estimasi regresi . Kriteria pengambilan keputusan:

Jika nilai p-value $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika nilai p-value $\geq 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.9.2 Uji F

Uji F merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara bersama-sama memiliki dampak signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel pada tingkat signifikansi tertentu. Jika F-hitung lebih besar daripada F-tabel, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang berarti variabel independen secara kolektif berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan.

3.10 Uji Koefisien Determinasi R^2

Penelitian ini mengharapkan nilai Adjusted R^2 mendekati angka 1, karena hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan proporsi besar dari variasi yang terdapat pada variabel dependen.

3.10.1 Uji R^2

Uji R^2 digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai R^2 yang ideal adalah 1, yang berarti seluruh variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel bebas yang digunakan dalam model. Apabila nilai Adjusted R^2 sama dengan 0, maka variabel independen memiliki kemampuan yang sangat lemah dalam menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai

Adjusted R^2 mendekati 1, maka hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen sudah tercakup dalam variabel independen. Oleh karena itu, suatu model dikatakan baik apabila nilai Adjusted R^2 mendekati angka 1.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Partisipasi Politik Perempuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik perempuan di Provinsi Lampung. Secara khusus, pendidikan menengah (SMA) yang direpresentasikan oleh variabel Educ1 memberikan pengaruh yang lebih besar dan positif terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan dibandingkan pendidikan tinggi (perguruan tinggi) yang diwakili oleh variabel Educ2. Educ1 menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi perempuan dengan latar belakang pendidikan SMA, semakin besar pula keterlibatan mereka dalam kegiatan politik, baik sebagai pemilih aktif maupun sebagai calon legislatif. Variabel Educ2 juga justru menunjukkan pengaruh yang signifikan, mengindikasikan bahwa meskipun perempuan berpendidikan tinggi memiliki potensi yang besar, mereka belum sepenuhnya terlibat dalam arena politik lokal. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural dan hambatan non-akademik yang menghambat partisipasi perempuan berpendidikan tinggi di ruang-ruang pengambilan keputusan.

5.2 Kesimpulan Perempuan di Angkatan Kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tinggi (perguruan tinggi) memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap partisipasi perempuan di angkatan kerja dibandingkan pendidikan menengah (SMA). Perempuan dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi cenderung lebih aktif dan memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam dunia kerja formal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, semakin besar pula dorongan dan kesiapan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu,

upah juga berpengaruh signifikan terhadap partisipasi kerja perempuan, di mana semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan, semakin besar pula motivasi perempuan untuk bekerja. Dengan demikian, peningkatan akses pendidikan tinggi dan jaminan upah yang layak menjadi faktor penting dalam mendorong keterlibatan perempuan di pasar kerja, khususnya di Provinsi Lampung.

5.3 Kesimpulan Proporsi Upah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, baik pendidikan menengah (Educ1) maupun pendidikan tinggi (Educ2), berpengaruh terhadap proporsi upah perempuan dibandingkan laki-laki di Provinsi Lampung. Di antara keduanya, pendidikan tinggi (Educ2) memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap peningkatan proporsi upah perempuan. Perempuan lulusan perguruan tinggi cenderung memiliki akses terhadap jenis pekerjaan yang lebih profesional dan berupah lebih tinggi, sehingga mendekatkan tingkat penghasilan mereka dengan laki-laki. Sementara itu, pendidikan menengah juga berkontribusi, namun tidak sebesar pengaruh dari pendidikan tinggi.

Selain faktor pendidikan, jumlah perempuan dan laki-laki yang bekerja juga berpengaruh signifikan terhadap proporsi upah. Peningkatan jumlah perempuan yang bekerja cenderung mendorong proporsi upah perempuan menjadi lebih tinggi, karena semakin banyak perempuan yang berkontribusi dalam sektor ekonomi, maka daya tawar mereka dalam dunia kerja pun meningkat. Sebaliknya, peningkatan jumlah laki-laki yang bekerja dapat memperlebar kesenjangan upah, karena dominasi laki-laki di sektor formal yang lebih mapan sering kali memperkuat struktur upah yang tidak setara.

5.4 Saran Partisipasi Politik Perempuan

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan akses pendidikan, khususnya pendidikan tinggi bagi perempuan, guna memperluas keterlibatan mereka dalam ranah politik. Selain itu, perlu adanya program pelatihan kepemimpinan dan literasi politik yang menysasar perempuan, terutama di daerah yang tingkat pendidikannya masih rendah. Partai politik juga diharapkan lebih aktif dalam merekrut dan mendukung kader perempuan untuk

meningkatkan keterwakilan yang tidak hanya memenuhi kuota, tetapi juga mampu memberikan kontribusi substantif dalam proses pengambilan kebijakan publik.

5.5 Saran Perempuan di Angkatan Kerja

Untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Provinsi Lampung, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan program peningkatan keterampilan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan perkembangan industri. Selain itu, penyediaan dukungan sosial seperti fasilitas penitipan anak, layanan konseling kerja, serta kampanye kesadaran publik mengenai pentingnya peran perempuan dalam sektor ekonomi perlu diperluas. Upaya ini penting untuk mengurangi hambatan struktural dan sosial yang selama ini membatasi mobilitas dan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, terutama bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan menengah maupun tinggi.

5.6 Saran Proporsi Upah

Untuk menekan kesenjangan proporsi upah antara perempuan dan laki-laki, disarankan agar pemerintah daerah merancang kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan responsif gender. Penegakan prinsip upah setara untuk pekerjaan yang setara (equal pay for equal work) perlu diperkuat, serta dilakukan monitoring berkala terhadap praktik pengupahan di sektor formal maupun informal. Selain itu, peningkatan akses perempuan terhadap jenis pekerjaan dengan produktivitas dan nilai ekonomi tinggi juga penting untuk didorong, misalnya melalui pendidikan teknis dan pelatihan berbasis kompetensi yang menjangkau wilayah-wilayah tertinggal. Intervensi ini diharapkan mampu memperkecil kesenjangan struktural yang menjadi akar perbedaan upah berbasis gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2015). *Kbji 2014 Kbji 2002*.
- Bardasi, E., & Gornick, J. C. (2008). Working for less? Women's part-time wage penalties across countries. *Feminist Economics*, 14(1), 37–72.
<https://doi.org/10.1080/13545700701716649>
- Bayumi, Rahaman, M., Alfit Jaya, R., & Zakat dan Wakaf, M. (2022). Kontribusi Peran Perempuan dalam Membangun Perekonomian sebagai Penguatan Kesetaraan Gender di Indonesia. *Al Huwiyah Journal of Woman and Children Studies*, 2(2), 30–42.
- Becker, P. N. (2014). Gary Stanley Becker (1930-2014). Economics as a study of human behaviour. *History of Economic Ideas*, 22(2), 9–22.
- Blau, K. (2023). The Gender Wage Gap. *Women and Leadership Development in College*, 55, 89–91. <https://doi.org/10.4324/9781003448761-23>
- Chambers, R. (2022). Going for growth. In *Engineering* (Vol. 2022).
- Chandra, A. A., Wahyuddin, Y. A., & Rizki, K. Z. (2024). Upaya Pemerintah Islandia Dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender (Studi Kasus : Fenomena Gender Pay Gap Di Dunia Kerja). *Indonesian Journal of Global Discourse*, 5(1), 1–22. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v5i1.81>
- Childs, S., & Krook, M. L. (2008). Critical mass theory and women's political representation. *Political Studies*, 56(3), 725–736.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2007.00712.x>
- Darmastuti, A. (2022). Network institutionalism in women's political interests advocacy for gender-mainstreaming of development in Lampung, Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(2), 165–178.
<https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i2.38227>
- Elson, D., Modern, S., Relevance, C.-T., Economy, I. P., & July, L. (2018). *Marx and Feminist Economics*. July, 1–14.
- Fish, B. (2020). *No Title*. 2507(February), 1–9.
- Gujarati. (2015). *Application of Panel Data in Economics*.
- Hausmann, R., Tyson, L. D., & Zahidi, S. (2022). Global Gender Gap Report 2022 Insight Report. In *World Economic Forum*.

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf

- Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. *Science*, 312(5782), 1900–1902. <https://doi.org/10.1126/science.1128898>
- Hidayat, S. (2018). Pemberdayaan Perempuan Berbasis Ekonomi Kreatif melalui Pelatihan Pembuatan Kaset dari Limbah Kain. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(1), 20–30. <https://doi.org/10.15294/pls.v2i1.23385>
- Hook, J. L., & Pettit, B. (2008). *LIS Working Paper Series Reproducing Occupational Inequality: Motherhood and Occupational Segregation*. 481. *Human Development Report 1995 (1).pdf*. (n.d.).
- Iskandar, Y., & Hamid, A. (2020). Tinjauan Spasial Upah Menurut Jenis Kelamin dan Kaitannya Dengan Indeks Kesenjangan dan Keadilan Gender di Indonesia. *Jurnal Bisnisman : Riset Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 1–19. <https://doi.org/10.52005/bisnisman.v1i2.6>
- Jeevanasai, J., Saole, P., Rath, A. G., Singh, S., Rai, S., & Kumar, M. (2023). Shades & shines of gender equality with respect to sustainable development goals (SDGs): The environmental performance perspectives. *Total Environment Research Themes*, 8(September), 100082. <https://doi.org/10.1016/j.totert.2023.100082>
- Klasen, S. (2018). The Impact of Gender Inequality on Economic Performance in Developing Countries. *Annual Review of Resource Economics*, 10, 279–298. <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-100517-023429>
- Laili, M. H., & Damayanti, A. (2018). Kesenjangan Upah Antargender di Indonesia: Bukti Empiris di Sektor Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18(3), 1–21. <https://doi.org/10.21002/jepi.2018.12>
- Limbong, R. J., & Sakinah, P. (2024). *Pasar Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia*. June, 0–20.
- Lusiyanti, L. (2020). Kesenjangan Penghasilan Menurut Gender Di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 4(1), 16. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v4i1.214>
- March, C., Smyth, I., & Mukhopadhyay, M. (1999). 1. A Guide to Gender-Analysis Framework. *A Guide to Gender-Analysis Frameworks*, 7–145. <https://doi.org/10.3362/9780855987602.001>
- Masruchiyah, N., & Laratmase, A. J. (2023). Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 12(2), 125–138. <https://doi.org/10.21009/10.21009.122.3>
- National Reproductive Health Development Policy and Strategy (2017-2026): Promotion of Healthy Birth and Child Development 1*. (2017). 1–19.

- Nations., U. (2014). Reproductive Rights are Human Rights. A Handbook. *Human Rights Institutions*.
<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NHRIHandbook.pdf>
- Rogayah, S. (2021). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Upah Riil: Analisis Tingkat Provinsi di Indonesia [Female Labour Force Participation Rate and Real Wage: Provincial-Level Analysis in Indonesia]. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(1), 57–69.
<https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.1982>
- Sari, R. A., & Sulastri, R. (2024). Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi di Karawang. *Gunung Djati Conference Series*, 39, 45–53.
<https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/2078>
- Silvi, S., Darmastuti, A., Cahyadi, R., Ilmu Pemerintahan, J., Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, F., Lampung, U., Bandar Lampung, K., & Lampung, P. (2024). Proses dan Kriteria Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung pada Pemilu 2024. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 493–511.
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs): SUATU REVIUW LITERATUR SISTEMATIS. *Journal Publicuho*, 5(4), 995–1010.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41>
- UNDP. (2020). Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender Dan Indeks Pembangunan Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 20(2), 67–81. <https://doi.org/10.30742/jisa20220201224>
- United Nations. (2017). *UN Women Annual Report 2015-2016*. 52.
- United Nations. (2020). *United Nations Development Programme: People, purpose. progress*. 2–25.
- Ussyarovi, A., & Siskarossa Ika Oktora. (2023). Proporsi Perempuan yang Bekerja pada Posisi Manajerial di Indonesia Tahun 2015-2021: Pendekatan Feasible Generalized Least Square. *Jurnal Statistika Dan Aplikasinya*, 7(1), 62–73. <https://doi.org/10.21009/jsa.07106>
- World Health Organization. (2012). *Social science methods for research on sexual and reproductive health*.
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/social_science/503112/en/index.html